



PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051018-8051021-8051023 Fax, (0751) 8051019-8051021-8051023

Yth : Asisten/ Staf Ahli/ Inspektur/
Kepala Badan/ Kepala Dinas/
Sekretaris DPRD/ Kepala
Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur
RSUD dan Camat di lingkungan
Pemerintah Kota Padang
di - Padang

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1047/BKPSDM-PDG/2026

TENTANG

PENGUSULAN BERKAS Pensiun dan Pemberhentian Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sehubungan dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta surat Kepala Badan Kepegawaian nomor D.III.26-30/V.174-I/99 tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan pertimbangan teknis Pensiun PNS berbasis PPO *less paper*, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi ASN yang akan mencapai Batas Usia Pensiun dapat menyampaikan berkas usulan pensiun atau pemberhentian sebagai ASN mulai 1 Tahun sebelum Batas Usia Pensiun dan minimal 6 bulan sebelum Batas Usia Pensiun.
2. Bagi ASN yang akan mengajukan pensiun atau pemberhentian sebagai ASN atas permintaan sendiri (APS) dapat menyampaikan berkas usulan pensiun atau pemberhentian sebagai ASN 6 bulan sebelum TMT pemberhentian.
3. ASN yang mengusulkan pensiun atau pemberhentian sebagai ASN **WAJIB** memastikan data kepegawaiannya di Aplikasi ASN Digital BKN (cek di menu layanan MyASN) telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki dan kondisi sebenarnya. Terhadap data ASN yang tidak sesuai, maka dapat melakukan update atau peremajaan data kepegawaiannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Informasi ASN (P2IA) BKPSDM Kota Padang. Adapun data kepegawaian di MyASN yang harus dipastikan sesuai dengan kondisi sebenarnya antara lain :
 - a) Data Foto Profil, dengan ketentuan menggunakan pakaian dinas, foto formal potret diri setengah badan, dan latar merah.
 - b) Data Alamat Domisili, diisi dengan alamat lengkap yang akan digunakan saat pensiun.
 - c) Data Jabatan.
 - d) Data Pangkat/Golongan.
 - e) Data Pasangan dan anak yang sesuai ketentuan peraturan (berumur dibawah usia 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja).
 - f) Data CPNS/PNS.
 - g) Data Pendidikan dan gelar.
 - h) Data Kinerja minimal 1 tahun terakhir.
 - i) Data Peninjauan Masa Kerja bagi yang memiliki.

4. ASN yang akan mengajukan usulan pensiun atau pemberhentian sebagai ASN, kelengkapan berkas usulannya dan file scan PDF yang akan diupload sebagaimana yang terdapat dalam lampiran surat ini, telah diteliti dan diverifikasi oleh pengelola kepegawaian di masing-masing OPD.
5. Bagi PNS yang diusulkan pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), BKPSDM menerima usulan pensiun melalui link <https://bit.ly/usul-pensiun-BUP> yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di OPD masing-masing dengan mengunggah hasil pindai/*scan* dokumen kelengkapan berkas usulan dengan memperhatikan ukuran file sesuai ketentuan. Hasil scan dokumen harus jelas terbaca dan tidak terpotong, disarankan agar menggunakan mesin *scanner*. OPD tetap mengirimkan *Hardcopy* surat pengantar nama-nama PNS yang diusulkan pensiun ke BKPSDM.
6. Bagi PNS yang diusulkan pensiun karena meninggal dunia, Atas Permintaan sendiri atau pemberhentian sebagai PPPK tetap mengirimkan berkas usulan *hardcopy* ke BKPSDM sebanyak 1 rangkap ditambah *softcopy* berkas usulan yang digabung kedalam 1 file PDF dengan ukuran maksimal 10 MB .
7. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam proses upload berkas pada Aplikasi SIASN, diminta kepada Pengelola Kepegawaian OPD untuk menverifikasi file scan PDF tersebut. Berkas Tidak Sesuai (BTS) setelah verifikasi BKPSDM/ BKN, maka diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk melengkapi kekurangan tersebut. Berkas yang belum dilengkapi sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan atau Berkas Tidak Sesuai (BTS) namun tidak dilengkapi maka proses pengusulan pensiun atau pemberhentian nya tidak dapat diproses selanjutnya sebelum melengkapi kekurangan berkas tersebut.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Ogi (0882-9469-0542).

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 18 Oktober 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. Walikota Padang,
Sekretaris Daerah



RAJU MINROPA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang
2. Bapak Wakil Walikota Padang

Lampiran
Surat Edaran
Nomor : 800/1047/BKPSDM-PDG/2026
Tentang : Pengusulan Berkas Pensiun Dan Pemberhentian Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
Tanggal: 18 Oktober 2026

1. PEMBERHENTIAN/PENSIUN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)* Batas Usia Pensiun (BUP) yang ditempel pasfoto PNS ybs
3	Foto Copy SK. Pertama (CPNS) dilegalisir
4	Foto Copy SK PNS dilegalisir
5	Foto Copy SK. Pangkat Terakhir dilegalisir
6	Foto Copy SK. Kenaikan Gaji Berkala Terakhir dilegalisir
7	Foto Copy SK. Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki) dilegalisir
8	Foto Copy Seluruh SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang pernah mengajukan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah dilegalisir
9	Foto Copy Kartu Pegawai dilegalisir
10	Foto Copy Surat Nikah dilegalisir
11	Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir
12	Foto Copy Akte Kelahiran Anak Umur di bawah 25 Tahun yang belum bekerja dan belum menikah dilegalisir
13	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia bagi suami/istri yang meninggal dilegalisir
14	Foto Copy Surat Keterangan Berceraai bagi suami/istri yang bercerai dilegalisir
15	Asli dan Foto Copy legalisir Daftar Susunan Keluarga yang diketahui Camat tempat tinggal
16	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
17	Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
18	Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

*) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018

**) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PNS yang bersangkutan bekerja.

2. PEMBERHENTIAN/PENSIUN KARENA MENINGGAL DUNIA (JANDA/DUDA/ANAK PNS)

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Asli Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)* Meninggal Dunia (MD) yang ditempel pasfoto ahli waris ybs
3	File foto Ahli waris dengan format .jpeg/.jpg latar merah
4	Foto Copy SK. Pertama (CPNS) dilegalisir
5	Foto Copy SK PNS dilegalisir
6	Foto Copy SK. Pangkat Terakhir dilegalisir
7	Foto Copy SK. Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir
8	Foto Copy SK. Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki) dilegalisir
9	Seluruh SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang pernah mengajukan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah dilegalisir
10	Foto Copy Kartu Pegawai dilegalisir
11	Foto Copy Surat Nikah dilegalisir
12	Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir
13	Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan tempat tinggal dilegalisir
14	Surat Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilegalisir

15	Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan tempat tinggal dilegalisir
16	Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan tempat tinggal dilegalisir
17	Foto Copy Akte Kelahiran Anak Umur di bawah 25 Tahun yang belum bekerja dan belum menikah dilegalisir
18	Asli dan Foto Copy legalisir Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat tempat tinggal
19	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
20	Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
21	Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PNS yang bersangkutan bekerja.

3. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dipercepat)

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Asli Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)* berhenti atas permintaan sendiri (APS) yang ditempel pasfoto PNS ybs
3	Asli dan foto copy Surat Permohonan Berhenti Sebagai PNS yang ditujukan kepada Wali Kota cq. Ka. BKPSDM dengan mencantumkan alasan pengajuan Berhenti atas permintaan Sendiri dan TMT Pensiun yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Kepala OPD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
4	Foto Copy SK. Pertama (CPNS) dilegalisir
5	Foto Copy SK PNS dilegalisir
6	Foto Copy SK. Pangkat Terakhir dilegalisir
7	Foto Copy SK. Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir
8	Foto Copy SK. Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki) dilegalisir
9	Foto Copy Seluruh SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang pernah mengajukan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah dilegalisir
10	Foto Copy Kartu Pegawai dilegalisir
11	Foto Copy Surat Nikah dilegalisir
12	Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir
13	Surat Keterangan Meninggal Dunia bagi suami/istri yang meninggal dilegalisir
14	Surat Keterangan Bercerai bagi suami/istri yang bercerai dilegalisir
15	Foto Copy Akte Kelahiran Anak Umur di bawah 25 Tahun yang belum bekerja dan belum menikah dilegalisir
16	Asli dan Foto copy legalisir Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat tempat tinggal
17	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
18	Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
19	Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PNS yang bersangkutan bekerja.

4. PENSIUN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI (UZUR)

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Asli Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP) yang ditempel pasfoto PNS ybs
3	Asli rekomendasi tim penguji kesehatan dari RS Pemerintah
4	Foto Copy SK. Pertama (CPNS) dilegalisir
5	Foto Copy SK PNS dilegalisir
6	Foto Copy SK. Pangkat Terakhir dilegalisir
7	Foto Copy SK. Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir
8	Foto Copy SK. Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki) dilegalisir
9	Foto Copy Seluruh SK Kenaikan Pangkat bagi PNS yang pernah mengajukan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah dilegalisir
10	Foto Copy Kartu Pegawai dilegalisir
11	Foto Copy Surat Nikah dilegalisir
12	Foto Copy Kartu Keluarga Legalisir
13	Surat Keterangan Meninggal Dunia bagi suami/istri yang meninggal dilegalisir
14	Surat Keterangan Bercerai bagi suami/istri yang bercerai dilegalisir
15	Foto Copy Akte Kelahiran Anak Umur di bawah 25 Tahun yang belum bekerja dan belum menikah dilegalisir
16	Asli dan Foto copy legalisir Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat tempat tinggal
17	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
18	Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
19	Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PNS yang bersangkutan bekerja.

5. PENSIUN ANUMERTA BAGI PNS YANG TEWAS

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Daftar Penerima Calon Pensiun (DPCP)* yang ditempel pasfoto ahli waris ybs
3	File foto Ahli waris dengan format .jpeg/.jpg latar merah
4	Foto copy Surat Tugas dari Kepala SKPD
5	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kronologis Kejadian dari Kepala SKPD sesuai anak lampiran Nomor 1b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
6	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan visum dari Kepolisian
7	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit
8	Pas foto (Janda/Duda/Anak dari PNS yang Meninggal Dunia)
9	Foto Copy SK. Pertama (CPNS)
10	Foto Copy SK. Pangkat Terakhir
11	Foto Copy SK. Kenaikan Gaji Berkala Tperakhir
12	Foto Copy SK. Penyesuaian Masa Kerja (bagi yang memiliki)
13	Seluruh SK Kenaikan Pangkat bagi PNS pengangkatan 1980 dan 1981 (yang tidak memiliki SK CPNS) dan PNS yang pernah mengajukan Kenaikan Pangkat dengan Penyesuaian Ijazah
14	Foto Copy Kartu Pegawai
15	Foto Copy Surat Nikah

16	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan
17	Foto Copy Surat Keterangan Janda/Duda dari Kelurahan tempat tinggal
18	Foto Cop Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan tempat tinggal
19	Foto Copy Akte Kelahiran Anak Umur di bawah 25 Tahun yang belum bekerja dan belum menikah
20	Asli dan Foto copy Daftar Susunan Keluarga yang diketahui oleh Camat tempat tinggal
21	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
22	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
23	Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kota Padang

6. PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA WAKTU PERJANJIAN KERJA BERAKHIR TERMASUK MENCAPAI USIA BUP

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Foto Copy SK. PPPK
3	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
4	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
5	Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PPPK yang bersangkutan bekerja.

7. PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Foto Copy SK. PPPK
3	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan tempat tinggal dilegalisir
4	Foto Copy Surat Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilegalisir
5	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
6	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
7	Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PPPK yang bersangkutan bekerja.

8. PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1	Surat pengantar dari SKPD
2	Foto Copy SK. PPPK
3	Asli dan foto copy Surat Permohonan Berhenti Sebagai PPPK yang ditujukan kepada Wali Kota cq. Ka. BKPSDM dengan mencantumkan alasan pengajuan Berhenti atas permintaan Sendiri dan TMT Pensiun yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Kepala OPD/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
4	Foto Copy SKP 1 Tahun Terakhir dilegalisir
5	Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai anak Lampiran 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**
6	Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai anak Lampiran 4 Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018*/**

Catatan:

- *) Format surat keterangan sesuai dengan lampiran Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018
- **) Surat ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di lingkungan PPPK yang bersangkutan bekerja.

Contoh : Daftar Perorangan Calon Pensiun (DPCP)
format bisa di-download melalui link : <https://bit.ly/FormatDPCP>



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

INSTANSI : PEMERINTAH KOTA PADANG
PROVINSI : SUMATERA BARAT
KAB/KOTA : PADANG
UNIT KERJA :
PEMBAYARAN : BPKAD
BUP : 58

PAS FOTO
2 X 3

DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

1. KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA :
B. NIP :
C. TEMPAT/TANGGALLAHIR :
D. JABATAN :
E. PANGKAT/GOL.RU/TMT : TMT :
F. GAJI POKOK TERAKHIR :
G. MASA KERJA KP TERAKHIR : TAHUN BULAN
H. MASA KERJA GOLONGAN : TAHUN BULAN
I. MASA KERJA PNS : TAHUN BULAN
J. MASA KERJA PENSIUN : TAHUN BULAN
K. CLTN : TAHUN BULAN
L. PENINJAUAN MASA KERJA : TAHUN BULAN
M. PENDIDIKAN DASAR :
PENGANGKATAN PERTAMA : Tahun

2. KETERANGAN KELUARGA

A. ISTERI/SUAMI

No.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	TGL KAWIN	TGL CERAI/MD	SUAMI/ ISTERI KE
1.						
2.						

B. ANAK KANDUNG

No.	NIK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.					
2.					
3.					

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI,
KEPALA

NIP.

PADANG, 20
PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSANGKUTAN

NIP.

CONTOH :
SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI ASN UNTUK SYARAT Pensiun Dipercepat / Atas Permintaan Sendiri

Padang, ...20...

Kepada
Yth. Wali Kota Padang
Cq. Kepala BKPSDM Kota Padang
Di
P A D A N G

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Alamat Rumah :

Dengan ini mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS/PPPK)* terhitung mulai)** dengan alasan)***

Dengan ini saya menyatakan bahwa sebelum menerima keputusan persetujuan / penundaan / penolakan pemberhentian, saya akan tetap menjalankan tugas kewajiban saya sebagai PNS.

Demikian surat permohonan berhenti ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala

Hormat Saya,

Meterai
Rp.10000

.....)****
NIP.

.....
NIP.....

Catatan:	
*	Coret salah satu
**	Tulislah tanggal, bulan dan tahun PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti
***	Tulislah Alasan permohonan berhenti
****	Tulislah nama jabatan dan NIP pimpinan tertinggi di lingkungan PNS yang bersangkutan bekerja.

Contoh :
Surat Keterangan Tidak Pernah Mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Padang, ...
Kepala

.....
Pangkat/Golongan
NIP.

Contoh :
Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Instansi :

tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka saya bersedia menanggung kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, ...
Kepala

.....
Pangkat/Golongan
NIP.